

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 kepala dinas, kepala bagian, kepala subbagian dan/atau sekretaris pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Partisipasi penyusunan anggaran (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial (Y). Maka dapat disimpulkan apabila pimpinan dan bawahan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran, maka dapat meningkatkan kinerja manajerial dari organisasi tersebut.
2. Kejelasan sasaran anggaran (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial (Y). Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum dapat membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat mempengaruhi kinerja manajerial.
3. Akuntabilitas publik (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial (Y). Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa

penelitian ini belum mampu untuk membuktikan bahwa akuntabilitas publik dapat mempengaruhi kinerja manajerial

4. Komitmen organisasi (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial (Y). maka dapat disimpulkan bahwa apabila individu memiliki komitmen yang sungguh-sungguh terhadap organisasi tempatnya bekerja maka akan berdampak pada peningkatan kinerja manajerial dari organisasinya.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi penelitian yang dapat diambil, diantaranya:

1. Adanya partisipasi dari seorang pimpinan dan bawahan SKPD terhadap proses penyusunan anggaran akan membuat kinerja dari SKPD tersebut akan lebih baik, hal ini terlihat karena pimpinan didalam SKPD selalu melibatkan bawahan untuk ikut ambil bagian didalam penyusunan anggaran, sehingga bawahan merasa bangga serta bertanggungjawab terhadap anggaran. Dengan adanya fakta tersebut, maka pemerintah selaku pembuat anggaran harus lebih memanfaatkan sumber daya yang ada didalam aparat pemerintah, hal ini dibutuhkan supaya banyaknya ide dan masukan terhadap anggaran yang akan dicapai, dengan banyaknya ide yang disumbangkan maka akan menghasilkan anggaran yang berkualitas sehingga adanya peningkatan kinerja yang dapat diukur dari anggaran yang telah dibuat.

2. Sebuah komitmen yang ditunjukkan oleh pimpinan SKPD terhadap tempatnya bekerja akan membuat kinerja pimpinan tersebut lebih baik sehingga akan berdampak pada kinerja SKPD tersebut juga baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pimpinan SKPD yang mempunyai masa kerja yang lebih dari 10 tahun. Dengan adanya loyalitas dari pimpinan terhadap SKPD maka sudah seharusnya pimpinan tersebut mampu menghasilkan kinerja yang baik dan menggunakan sumber daya yang baik untuk kepentingan SKPD, sehingga bawahan mempunyai penilaian yang baik kepada pimpinan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel keluar daerah sehingga menambahkan bukti-bukti empiris penelitian terkait kinerja manajerial. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel independen seperti ketepatan skedul anggaran, ketidakpastian tugas, dan senjangan anggaran (*budgetary slack*).

2. SKPD DKI Jakarta wilayah Jakarta Pusat

Diharapkan pimpinan dan jajaran SKPD Jakarta Pusat mampu bekerja sama untuk menghasilkan anggaran yang baik, serta bertanggungjawab kepada masyarakat terkait program kerja yang memang menggunakan

uang rakyat, serta pimpinan dan jajaran mampu mendahulukan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi.

3. Pemerintah

Diharapkan pemerintah pusat selalu mengawasi alur keuangan yang dialokasikan untuk kepentingan publik, serta pemerintah mampu menjadi teman masyarakat yang mampu ramah dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga harus netral dengan seluruh pihak yang dipentingkan sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang mencoretkan nama baik pemerintah.